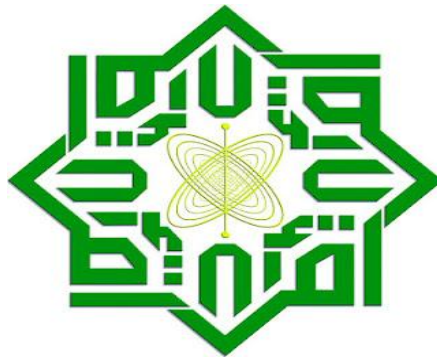


SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI PADA PETUGAS
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN ORANG PRIBADI DALAM
MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru



Oleh:

ASRIDAYATI

10873004513

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI PADA PETUGAS PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN ORANG PRIBADI DALAM MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK

Oleh :ASRIDAYATI

Salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berupaya sedemikian rupa agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar, upaya tersebut mengarah pada satu hal yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi orang pribadi pada petugas pajak. Terhadap kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dengan sampel sebanyak 92 pedagang dengan menggunakan teknik sensus.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitung $2,838 > t$ tabel $1,988$. (2) persepsi pada petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari pengolahan SPSS diperoleh hasil t hitung $3,938 > t$ tabel $1,988$. Sedangkan secara simultan kedua variabel bebas pengetahuan dan persepsi pada petugas pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari hasil SPSS f hitung $13,974 > f$ tabel $3,100$. Dari hasil pengolahan data diperoleh r dan r squared sebesar $0,239$ atau $23,9\%$, sedangkan sisanya sebesar $76,1\%$ dipengaruhi variabel lain.

Key Words : Pengetahuan pajak dan Persepsi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan penelitian adalah.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian yaitu.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori tingkat kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.2 Pajak.....	11
2.2.1 Definisi Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	11
2.2.3 Hambatan Pemunggutan Pajak.....	12
2.2.4 Wajib Pajak.....	12

2.2.5	Tata Cara Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak.....	13
2.2.6	Pendaftaran Diri Menjadi Wajib Pajak.....	13
2.2.7	Sanksi untuk Orang Pribadi yang tidak	
	Mendaftarkan Sebagai Wajib Pajak	15
2.2.8	Tingkat kepatuhan wajib pajak.....	16
2.2.8.1	Definisi kepatuhan wajib pajak.....	16
2.2.9	Hak Wajib Pajak.....	18
2.2.10	Pengertian pengetahuan.....	20
2.2.10.1	Definisi Pengetahuan.....	20
2.2.10.2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	
	pengetahuan	21
2.2.11	Persepsi pada petugas pajak.....	21
2.2.11.1	Pengertian Persepsi.....	21
2.2.12	Pandangan Islam tentang pajak	22
2.3	Pengembangan Hipotesa.....	23
2.3.1	Pengetahuan Pajak	23
2.3.2	Persepsi pada Petugas Pajak.....	23
2.4	Desain Penelitian.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Lokasi penelitian	26
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5	Defenisi Operasional Variabel dan pengukuran Variabel.....	29
3.6	Metode Analisis Data	31
3.7	Pengujian Kualitas Data	32
1.	Uji Normalitas	32
2.	Uji Validitas	32
3.	Uji Realibilitas.....	34
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	34
1.	Uji Multikoloniertas.....	34
3.9	Pengujian Hipotesa.....	36
1.	Koefisien Regresi Uji T.....	37
2.	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F).....	37
3.	Koefisien Determinasi (R2).....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Kuesioner dan Demografi Responden.....	41
4.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	43
4.3	Analisis Data Penelitian.....	47
4.3.1	Hasil Statistik Deskriptif Variable.....	47

4.3.2 Hasil Uji Normalitas Data.....	48
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	50
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	50
4.5 Analisis Hasil Regresi.....	51
4.5.1 Uji Parsial (Uji T).....	53
4.5.2 Uji Simultan (Uji F)	55
4.5.3 Koefisien Determinasi	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan.....	61
5.3 Saran- saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	41
Tabel IV.2	Demografi Responden	42
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Pengetahuan pajak.....	44
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Persepsi pada petugas pajak....	45
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.....	46
Tabel IV.6	Hasil Deskriptif.....	47
Tabel IV.7	Hasil Uji Normalitas.....	48
Tabel IV.8	Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel IV.9	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel IV.10	Hasil Regresi secara parsial(Uji t)	53
Tabel IV.11	Hasil Uji Simultan(Uji F)	56
Tabel IV.12	Hasil Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.4	Gambar Model penelitian	25
Gambar IV.1	Gambar Diagram P-P Plot Normalitas.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat mengerakan peran dari semua lapisan subjek. Pajak yang besar peranan dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri. Yang sangat diperlukan guna mewujudkan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang perpajakan baru yang terdiri dari atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan dan dilandasi Falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga kenegaraan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme apatur perpajakan. Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari sebelum optimalnya penerimaan pajak.

Untuk mencapai target itu pajak, perlu tumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemunggaran pajak yang dilakukan sekarang pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya telah melakukan modernisasi. Namun perlu diingat bahwa sebelumnya kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini telah dikenal kelompok yang masih bersifat sederhana, primitif, dan kecil dalam bentuk suku-suku, kesatuan daerah, kesatuan keturunan.

Menurut P.J.A.Adriani(dalam Mardiasmo,(2009). Pajak adalah iuran kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pendapat para ahli perpajakan tersebut diatas maka pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung.

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di indonesia, sistem pemunggutan pajaknya hanya bertumpu kepada *Official Assesment System*. Namun setelah reformasi perpajakan, sistem pemunggutan pajaknya selain *Official Assesment System* juga *Self Assesment System*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System*, yaitu sistem pemunggutan pajak diberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan juga fiskus).

Pada pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa: Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan -undangan perpajakan. Jadi penekananya wajib pajak harus aktif

dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala yang dengan pelunasan pajaknya.

Sistem pemunggutan pajak tersebut mempunyai arti dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara umum jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku. Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Peraturan Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang suka rela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak. Namun saat ini wajib pajak masih takut mengurus masalah perpajakannya, padahal hak kewajiban pajak untuk mengurus masalah perpajakan yang diatur dengan undang-undang perpajakan itu sendiri (dalam hal ini UU KUP No.28/2007) telah diatur dengan tegas hak kewajiban,dan sanksi jika petugas pajak (fiskus) melakukan kesalahan/kesewenangan kepada wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang petugas masih rendah (Gardiant dan Maryanti, 2006), sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga diperoleh dari

radio, televisi, majalah perpajakan, surat kabar, internet, buku perpajakan, seminar perpajakan dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat sering dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komperesif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai dari pendidikan menengah sampai kejenjang perguruan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara komprehensif, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, masyarakat juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selain ini banyak masyarakat yang berpersepsi negatif pada masyarakat pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada masyarakat, apalagi saat terjadinya penelitian dan pemeriksaan pajak. Banyak berpendapat bahwa aparat pajak pun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan Akademis dan Direktorat Jenderal pajak agar mampu memberikan sosialisai mengenai pajak dan penerimaan pajak sehingga kedepan mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI PADA PETUGAS PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN ORANG PRIBADI DALAM MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?
2. Apakah ada pengaruh persepsi pada petugas pajak terhadap orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?
3. Apakah ada secara bersamaan pengaruh pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian adalah:

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pada petugas pajak terhadap orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Untuk mengetahui secara bersamaan pengaruh pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan mempraktekkan pada kondisi yang nyata.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

4. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan

penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penelitian sebelumnya, perumusan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Pada Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga diuraikan tentang hipotesis-hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional penelitian, variabel penelitian dan alat analisis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan segala pengujian pada variable independen dan dependen penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak yang terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto (dalam Chaizi Nasucha, 2004:134). Kepatuhan dapat mengandung empat proses, yaitu sebagai berikut:

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena di indoktrinasi untuk berbuat seperti yang di kehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dari mematuhi kaidah tersebut.
2. *Habitution*, Yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas, dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
3. *Utility*, Yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasa memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum kaerna merasakan kegunaan hukun untuk menciptakan keadaan yang di harapkan.
4. *Group Indetification*, Yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan indenfikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan indentifikasi terseebut.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:133) kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga prosees sebgai berikut:

1. *Compliance*, Yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan di adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum tetapi ada unsur

pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika pengawasannya yang efektif dari penegak hukum.

2. *Idenvification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi insiaktif dan motivasi untuk mematuhi hukum addalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik buruknya hubungan ini.
3. *Internalization*, orang akan mematuhi hukum karena dengan kepatuhanya akan diperoleh imbalan, dalam keadaan demikian mungkin terjdai bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendaknya memberikan imbalan bagi dirinya.

2.2 PAJAK

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi Wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 2 UU KUP) .

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak:

- a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Hambatan Pemunggutan Pajak

Hambatan terhadap pemunggutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.2.4 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemunggutan pajak dan pemotongan tertentu (Munawir 2003, h.5). Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan, menyelenggarakan pembukuan dan catatan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemunggut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam tata usaha Kantor

Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit. Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mempunyai NPWP dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini.

- a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP
- b. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT
- c. Bendarawan pemerintah pusat/daerah.

2.2.5 Tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ada dua:

- a. Secara langsung

Berdasarkan *Sistem Self Assessment* setiap wajib pajak mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Elektronik atau E-registration

Yaitu suatu cara pendaftaran melalui media elektronik on-line melalui situs pajak (www.pajak.go.id).

2.2.6 Pendaftaran diri Menjadi Wajib Pajak

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan berdasarkan *Sistem Self Assessment*. Tempat Pendaftaran wajib pajak perorangan untuk memperoleh NPWP adalah Kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan yang wilayah kerjanya meliputi daerah yang dimana wajib pajak bertempat tinggal.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Direktur jenderal pajak menerbitkan Nomor Wajib Pajak secara jabatan apabila Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Prosedur pendaftaran untuk memperoleh NPWP Wajib pajak perorangan Meminta formulir pendaftaran Wajib pajak (KP.PDIP4.1), mengisi dan menandatangani dengan melampirkan:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atau SIM atau Paspor
- b. Fotocopy Surat Izin Usaha
- c. Fotocopy Izin kerja bagi tenaga asing.

Suatu dasar pengaturan pajak mulai dari UUD 1945, UU peraturan menteri (khususnya Menteri Keuangan) termasuk didalamnya keputusan menteri

keuangan peraturan daerah hingga ke peraturan direktorat jenderal pajak. Pengenaan pajak dibebankan oleh negara kepada masyarakat ada dasar pengaturannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan kewajiban. Bagaimana dengan pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat selama ini periode kurun waktu berlakunya UUD 1945 tersebut. Bila ada pengenaan pajak kepada masyarakat tanpa dasar undang-undang. Artinya melalui kebijakan peraturaran. Asas pemunggutan pajak:

- a. *Equality* (asas persamaan)
- b. *Certainty* (asas kepastian)
- c. *Convenience* (asas menyenangkan)
- d. *Economy* (asas efisiensi).

2.2.7 Sanksi untuk Orang Pribadi yang tidak Mendaftarkan Sebagai Wajib Pajak

Setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

2.2.8 Tingkat kepatuhan wajib pajak

2.2.8.1 Definisi kepatuhan wajib pajak

Menurut Safri Nurmanto (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dikemukakan oleh D. Nawak (dalam siti kurnia rahayu,2010:138) sebagai: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,tercermin dalam situasi dimana, Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan.

- a. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- c. Membayar yang terutang tepat pada waktunya.

Sesuai dengan sistem self assessment,Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, Melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan,mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, dalam batas waktu yang telah disiapkan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa,Wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan.

Dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto (dalam Chaizi Nasucha, 2004:134). Kepatuhan dapat mengandung empat proses, yaitu sebagai berikut:

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena di indoktrinasi untuk berbuat seperti yang di kehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetshui dari mematuhi kaidah tersebut.
2. *Habitution*, Yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas, dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
3. *Utility*, Yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasa memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum kaerna merasakan kegunaan hukun untuk menciptakan keadaan yang di harapkan.
4. *Group Idevification*, Yaitu kepatuhan hukum didasrkan pada kebutuhan untuk mengadakan indenfikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan indentifikasi terseebut.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:133) kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga prosees sebgai berikut:

1. *Compliance*, Yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan di adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum tetapi ada unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika pengawasannya yang efektif dari penegak hukum.
2. *Idenvification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi insiaktif dan motivasi untuk mematuhi hukum addalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik buruknya hubungan ini.
3. *Internalization*, orang akan mematuhi hukum karena dengan kepatuhanya akan diperoleh imbalan, dalam keadaan demikian mungkin terjdai bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendaknya memberikan imbalan bagi dirinya.

2.2.9 Hak Wajib Pajak

Selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat

Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang.

1. Wajib Pajak berhak memperoleh pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek Pajak.
4. Pembebasan pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan *force majeure* seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.
5. Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah⁶. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
7. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

8. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan
9. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak., Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

2.2.10 Pengertian pengetahuan

2.2.10.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003*).

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek suatu objek terjadi melalui panca indera manusia yakni, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoamodjo, 2003)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat kita definisikan bahwa: Pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak

tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman.

1.2.10.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2007) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya adalah:

a. Faktor internal

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Umur

b. Faktor eksternal

1. Faktor lingkungan
2. Sosial budaya

2.2.11 Persepsi pada petugas pajak

2.2.11.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Arfan Iksan, Muhammad Ishak, 2008) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera

Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera.

Dari beberapa definisi persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda.

2.2.12 Pandangan Islam tentang pajak dalam Surat At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

2.3 Pengembangan Hipotesa

2.3.1 Pengetahuan Pajak

Menurut Sudjana (dalam Ridwan,2008:12) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.

Menurut Notoatmodjo (2003) Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang.

Berdasarkan teori diatas maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

H1 :Diduga Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2.3.2 Persepsi pada Petugas Pajak

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Arfan Iksan, Muhammad Ishak, 2008) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera.

Dari beberapa definisi persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan Persepsi pada petugas pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

H₂ : Diduga Persepsi pada petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

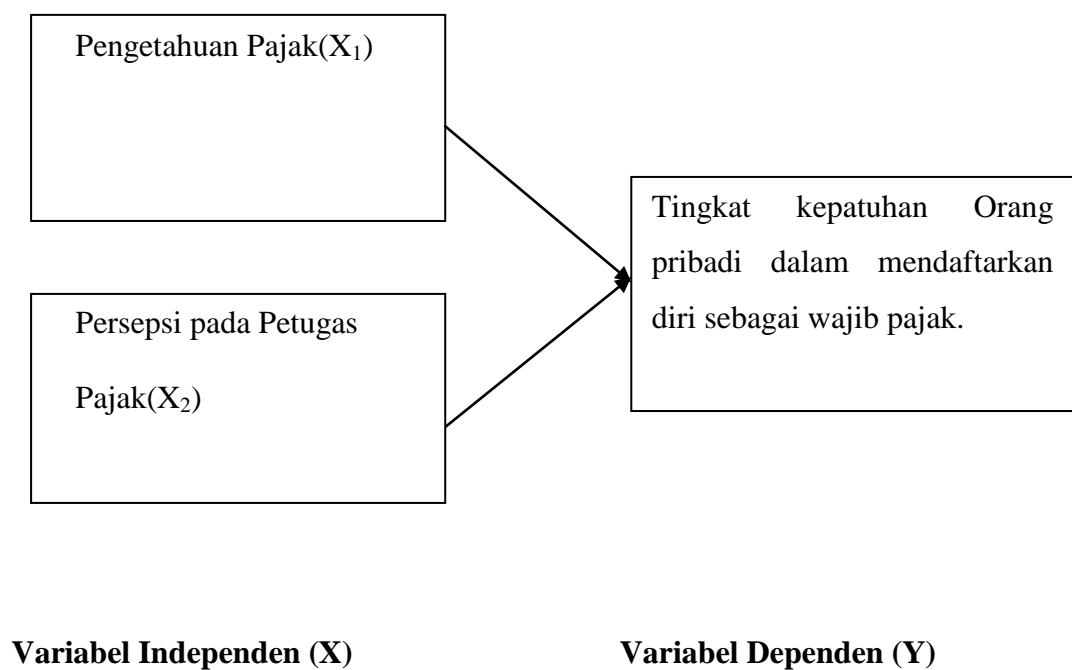
2.4 Desain Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan dua variabel dijelaskan antara lain: variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari atas pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan landasan teori dan keterangan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar II.4

Model penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kota Pekanbaru di Pasar Pariwisata (Pasar Bawah) Kecamatan Senapelan khususnya para pedagang.

1.2 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sugioyono (2003:73) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang di Kawasan Pasar Bawah (Pasar Pariwisata) di Kota Pekanbaru

b. Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari unsur populasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus Slovin yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dengan mewakili keseluruhan responden penelitian (Sugiyono, 2007: 96).

Penetapan ukuran sampel didasarkan atas pertimbangan Roscoe (dalam Sugiyono,2003) yang mengatakan: pertama ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian sosial adalah antara 30 sampai dengan 500 sampel, kedua, bila

sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel tiap kategori minimal 30.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 10% dari jumlah pedagang di Pasar Bawah (Pasar pariwisata) 1030 jiwa yaitu mencapai 92 orang dan dibulatkan menjadi 92 pedagang Pasar Pariwisata (Pasar Bawah) yang beaktivitas disekitar Kawasan Pasar Bawah (Pasar Pariwisata).

Dalam penelitian ini penarikan Sampel peneliti menggunakan rumus Solvin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N_e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

E = Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (1 %, 5%, 10%)

Adapun jumlah populasi atau pedagang di pasar Pariwisata sebanyak 1030 jiwa, maka dengan besar jumlah tersebut dan untuk menghemat biaya, tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 10(0,1) dari populasi yang berjumlah 1030 orang pedagang, untuk menentukan sampel dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N_e^2}$$

$$n = \frac{1030}{1 + 1030 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1030}{1 + 1030 \times (0,01)}$$

$$n = \frac{1030}{1 + 10,3}$$

$$n = \frac{1030}{11,3}$$

$$n = 91,1$$

$$n = 92$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 1030 pedagang adalah sebanyak 92 orang pedagang.

1.3 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan laporan ini jenis yang penulis gunakan yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, penulis memperoleh Data Primer ini yaitu melakukan Observasi dan wawancara secara langsung. Data primer diperoleh dari kuisisioner dan observasi, observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan terhadap lokasi penelitian yaitu di Pasar Pariwisata (Pasar bawah) khusus Pedagang.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Adalah kegiatan pengamatan langsung lapangan terhadap objek penelitian yang ada dalam rangka untuk mendapat data dan informasi yang akurat mengenai pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang merupakan komunikasi langsung dengan objek penelitian dimana penulis langsung mengadakan pertanyaan dengan pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini.

c. Kuesioner (angket)

Yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dari jawaban itu diharapkan akan menemukan hubungan atau pengaruh antara variabel yang dianalisis. Kuesioner ini sistem penyebarannya dengan cara dibagikan kepada para pedagang pasar pariwisata Senapelan Pekanbaru.

1.5 Defenisi Operasional Variabel dan pengukuran Variabel

Mudjiarati, (2003:123), menyatakan bahwa variabel adalah suatu yang mendapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Yang menjadi variabel dependen adalah Tingkat kepatuhan Orang

pribadi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Y) dan variabel independennya adalah pengetahuan tentang pajak (X1), Persepsi pada petugas pajak (X2).

a. Variabel Dependen (Y)

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka penelitian ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat Setuju), 2 (Tidak setuju), skala 3 (Ragu-Ragu), skala 4 (Setuju), skala 5 (Sangat Setuju).

b. Variabel Independen (X)

Untuk mengukur seberapa pengaruh tingkat pengetahuan pajak (X1) dan Persepsi pada petugas pajak (X2).

1. Pengetahuan tentang pajak (X₁)

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh Pengetahuan tentang pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang sangat tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

2. Persepsi pada petugas pajak (X₂)

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh persepsi pada petugas pajak (X₂), maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu) , skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

1.6 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Adapun alasan penggunaan regresi linier berganda adalah karena penelitian ini akan membahas hubungan dua variabel independent yaitu : pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak dan satu variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Untuk menganalisis jawaban kuesioner dari responden, diberi nilai dengan menggunakan ketentuan *skala Likert* (Sugiyono, 2003) sebagai berikut:

A = Bobot Nilai = 5 (Sangat Setuju)

B = Bobot Nilai = 4 (Setuju)

C = Bobot Nilai = 3 (Netral)

D = Bobot Nilai = 2 (Tidak Setuju)

E = Bobot Nilai = 1 (Sangat Tidak Setuju)

Instrument penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk *checklist* atau *cross* pada pilihan yang telah diberikan.

Keuntungan skala Likert adalah:

1. Mudah dibuat dan diterapkan.
2. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan.
3. Jawaban suatu item dapat berupa alternatif, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas.

4. Reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas.

1.7 Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada koesioner merupakan ukuran yang akan diuji. Agar data yang didapatkan dari para responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diukur, maka dilakukan tiga macam tes yaitu uji normalitas, uji validitas, dan uji realibilitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur adat berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus dipenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

2. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksi. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation Product Moment*. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam instrumen penelitian dapat menunjukkan variabel penelitian yang ditentukan.

Syarat untuk menyatakan kesahihan tiap instrumen pengukur/atribut adalah: pertama, bila skor tiap pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasikan koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pengujian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2002). Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrument untuk mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrument tersebut. Suatu instrument dinyatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya.

Data yang valid tergantung dari:

1. Ketepatan penelitian dalam memilih responden sebagai sampel penelitian
2. Kepatuhan para responden dalam mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam kuesioner
3. Keadaan para responden pada saat mengisi kuesioner

Uji validitas untuk penelitian ini menggunakan korelasi Pearson. Alasan digunakan teknik ini karena statistik ini sudah sangat luas dan interpretasinya tidak terlalu rumit, selain itu model tersebut dapat digunakan untuk mengkorelasikan skor per item dengan skor totalnya. Cara penentuan validitas data adalah dengan membandingkan jawaban pertanyaan dan total jawaban pada setiap variabel penelitian saling dikorelasikan. Hasil dari korelasi tersebut dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih

besar dari pada r tabel, maka instrument tersebut adalah valid, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r tabel maka instrument tersebut tidak valid.

3. Uji Realibilitas.

Istilah reliabilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Meskipun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus selalu diuji dengan melakukan tes ulang, karena berbagai teknik telah memungkinkan pengujian reliabilitas yang tidak memerlukan lebih dari satu kali pengukuran.

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini (Indrianti dan Supomo, 2002:179).

1.8 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikoloniertas

Menurut Gujarati & Kutner Multikoloniertas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Jelas bahwa multikoloniertas adalah suatu kondisi yang menyalahi asumsi regresi linier. Tentu saja, multikoloniertas tidak mungkin terjadi apabila variabel bebas (X) yang diikutsertakan hanya satu.

Ciri-ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami multikoloniertas adalah :

1. Terjadi perubahan yang berarti koefisien model regresi (misal nilainya menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan atau pengeluan sebuah variabel bebas dari model regresi.
2. Diperoleh nilai R-square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial.
3. Tanda (+ atau -) pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori (atau logika). Misal, pada teori (atau logika) seharusnya b_1 bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-).
4. Nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya (overestimated).

Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikoloniertas, dapat dipaksa menggunakan VIF. VIF merupakan signifikan dari variance Inflation Factor. Nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikoloniertas yang serius di dalam model regresi kita

Menurut Santono (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikoloniertas dengan variabel bebas lainnya.

1.9 Pengujian Hipotesa

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (x_1, x_2, \dots, x_n) dengan variabel dependen (Y). Berikut ini adalah persamaan Regresi Linear Berganda, dimana variabel dependennya adalah Tingkah Kepatuhan Orang Pribadi (Y) variabel independennya adalah Pengetahuan Pajak (X_1) dan Persepsi pada Petugas Pajak (X_2).

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots H_1$$

$$Y = a + b_1X_2 + e \dots\dots\dots H_2$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \dots\dots\dots H_3$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Tingkat kepatuhan Orang Pribadi)

X_1, X_2 = Variabel bebas 1,2 (Pengetahuan Pajak dan Persepsi
Pada petugas Pajak)

a = Konstanta

b_1 dan b_2 = Koefisien Regresi

e = Error

Hipotesis I pengetahuan pajak dengan menggunakan uji F

Hipotesis II persepsi pada petugas pajak sistem pengujianya sama dengan hipotesis I yaitu uji F.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p_{value} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

1. Koefisien Regresi Uji T

Menunjukkan berapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% (0.05). jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dengan variabel berikutnya.

Kriteria pengujian H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban berikut ini :

- a. Alternatif SS (Sangat Setuju 5)
- b. Alternatif S (Setuju 4)
- c. Alternatif N (Netral 3)
- d. Alternatif KS (Kurang Setuju 2)
- e. Alternatif STS (Sangat Setuju 1)

2 . Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($x_1...x_2...x_n$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). (Dwi Priyanto, 2009 : 81). Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Jumlah sampel

Dalam Uji F kesimpulan yang didapat adalah melihat signifikan (α) 5%

dengan ketentuan :

$F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak : independen tidak berpengaruh secara simultan kepada dependen.

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima : independen berpengaruh secara simultan kepada dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Untuk mengetahui variable independen mana yang paling berpengaruh terhadap variable dependennya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variable independen yang paling berpengaruh terhadap variable dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling besar. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variable independen mampu menjelaskan bersama-sama variable dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variable independen dalam menjelaskan variable dependennya. Uji ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Diterminasi

ESS : *expended sum square* (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS : *Total sum square* (jumlah total kuadrat)

Uji koefisien Diterminasi R^2 dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase sambungan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependend (Y) persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Semakin besar koefisian diterminasi maka semakin baik variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen (Imam Ghozali,2006)

Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila nilai R^2 bernilai 0 maka dapat ditentukan bahwa tidak ada variasi dependent yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R^2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bab ini meliputi hasil penelitian secara empiris pengaruh pengetahuan tentang pajak dan persepsi pada petugas pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda.

1.1 Kuesioner dan Demografi Responden

Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh Pedagang pasar bawah (pasar pariwisata). Dari hasil penyebaran kuesioner, total yang kembali kepada peneliti yaitu sebanyak 92 responden. Semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk di olah yaitu 92 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat di lihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Tingkat Pengumpulan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarkan	92	100%
Total kuesioner yang terkumpul kembali	92	100%
Total kuesioner yang dapat diolah	92	100%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 92 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 92 kuesioner atau 100%.

Tabel IV.2
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
	92	100%
Penghasilan		
a. Kurang dari Rp 3.500.000	11	11,95%
b. Rp 3.600.000-Rp 9.000.0000	39	42,39%
c. Rp 10.000.000-Rp 12.000.000	22	23,91%
d. Diatas Rp 12.000.000	20	21,73%
Jenis kelamin		
a. Pria	37	40,21%
b. Wanita	55	59,78%
Pendidikan		
a. SD-SMA	64	69,56%
b. D3	15	16,30%
c. S1	13	14,13%
Umur		
a. Antara 20 sampai 30 tahun	31	33,69%
b. Antara 31 sampai 50 tahun	43	46,73%
c. Diatas 50 tahun	18	19,56%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan penghasilan dalam penelitian ini adalah kurang

dari Rp 3.500.000 11 responden atau 11,95% (Rp.3.600.000 sampai Rp 9.000.000) 39 responden atau 42,39% (Rp.10.000.000 sampai Rp.12.000.000) 22 responden atau 23,91% Diatas Rp 12.000.000, 20 responden 21,73%. Demografi responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh pria yaitu sebanyak 34 responden atau 36,95% dan wanita sebesar 55 responden atau 59,78%. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SD/ sederajat samapai SMA/ sederajat, 64 responden atau 69,56%, D3/ sederajat 15 responden atau 16,30%, S1/ sederajat, 13 responden atau 14,13%. Umur responden dalam penelitian ini adalah 31 responden atau 33,69% mempunyai umur antara 20 sampai 30 tahun, 43 responden atau 46,73% mempunyai umur antara 31 sampai 50 tahun, dan 18 responden atau 19,56% yang mempunyai umur diatas 50 tahun.

1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk valid dan reliabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau reliabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis.

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dan

pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran untuk menguji validitas dari instrumen penelitian (Ghozali, 2002:25). Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *pearson Korelation* lebih besar dari nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 92, maka r tabelnya adalah 0,203

Sedangkan penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* guna menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu kontruks atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, (2006). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* atau diukur sekali saja.

Tabel IV.3
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan tentang pajak

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Pengetahuan tentang pajak			0,658	<i>Reliabel</i>
P1	0,574	Valid		
P2	0,495	Valid		
P3	0,616	Valid		
P4	0,481	Valid		
P5	0,335	Valid		
P6	0,299	Valid		
P7	0,486	Valid		

Sumber: Data olahan

Dari tabel IV.3 dapat dijelaskan bahwa Pengetahuan tentang pajak diukur dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7 memiliki nilai lebih besar dari 0,203 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel pengetahuan pajak valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,658 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel IV.4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi pada petugas pajak

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Persepsi pada petugas pajak			0,746	<i>Reliabel</i>
P1	0,286	Valid		
P2	0,293	Valid		
P3	0,739	Valid		
P4	0,638	Valid		
P5	0,628	Valid		
P6	0,744	Valid		
P7	0,739	Valid		
P8	0,638	Valid		

Sumber: Data olahan

Dari tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa Persepsi pada petugas pajak dengan 8 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7,8 memiliki nilai lebih besar dari 0,203 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel persepsi pada petugas pajak valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,746 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel V.5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib			0,747	<i>Reliabel</i>
TP1	0,429	Valid		
TP2	0,640	Valid		
TP3	0,677	Valid		
TP4	0,508	Valid		
TP5	0,367	Valid		
TP6	0,598	Valid		
TP7	0,729	Valid		
TP8	0,556	Valid		
TP9	0,777	Valid		
TP10	0,705	Valid		
TP11	0,626	Valid		
TP12	0,474	Valid		

Sumber : Data olahan

Dari tabel IV.5 dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak diukur dengan 12 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 memiliki nilai lebih besar dari 0,203 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,747 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

1.3 Analisis Data Penelitian

1.3.1 Hasil Statistik Deskriptif Variable

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap 92 responden yang telah memenuhi syarat pengelolaan data selanjutnya. Hasil statistik deskriptif variable penelitian dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
TOTALY	28.34	4.001	92
TOTALX1	28.91	1.783	92
TOTALX2	27.80	2.818	92

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel IV.6 Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Y) mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 28.34 dengan standar deviasi 4.001. Dengan demikian pengetahuan pajak (X1) mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 28.91 dengan standar deviasi 1.783. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pengetahuan pajak tinggi. Dan persepsi pada petugas pajak (X2) mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 27.80 dengan standar deviasi 2.818.

4.3.2 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.7 berikut :

Tabel IV.7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TOTALX1	TOTALX2	TOTALLY
N		92	92	92
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	28.91	27.80	28.34
	Std. Deviation	1.783	2.818	4.001
Most Extreme Differences	Absolute	.165	.175	.131
	Positive	.165	.119	.131
	Negative	-.141	-.175	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.586	1.681	1.255
Asymp. Sig. (2-tailed)		.013	.007	.086

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

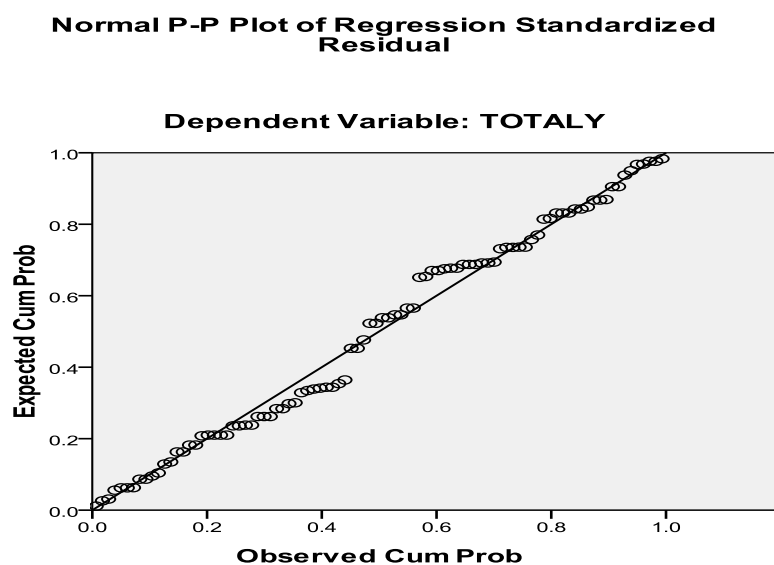
Sumber: Data olahan

Tabel IV.7 menunjukkan hasil K-S-Z untuk variabel pengetahuan tentang pajak adalah sebesar 0,013 signifikansi sebesar 1,586. Nilai K-S-Z untuk persepsi

pada petugas pajak adalah sebesar 1,681 signifikansi sebesar 0,06. Nilai K-S-Z untuk variabel Tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah sebesar 1,255 signifikansi 0,202 sebesar. Semua nilai K-S-Z tersebut $>$ dari 5% atau 0,05, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Deteksi normalitas juga dapat dilihat menggunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standarized Residual sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Diagram P-P Plot Normalitas



Sumber : Data olahan

Pada gambar IV.1 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normal dapat

melihat grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2002).

1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF paling banyak dilakukan dalam penelitian di Indonesia. Asumsi Multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10. Karena $VIF = 1$ Maka asumsi bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika tolerance diatas 0,5 . Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel IV.8 berikut :

Tabel IV.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Asumsi	Keterangan
Pengetahuan tentang Pajak	0,973	1,027	VIF/Tolerance	Bebas
Persepsi pada petugas pajak	0,973	1,027	VIF/Tolerance	Bebas

Sumber : Data olahan

Dari tabel IV.8 diatas, dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan tentang pajak mempunyai nilai VIF sebesar 1,027. Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan. Dan variabel persepsi pada petugas pajak nilai VIF sebesar 1,027 Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa

disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan.

1.5 Analisis Hasil Regresi

Tabel IV.9

Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std.error
1 (Constant)	-3,493	6,593
Pengetahuan tentang pajak	0,597	0,210
Persepsi pada petugas pajak	0,524	0,133

Sumber: Data olahan

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y' = -3,493 + (0,597)X_1 + (0,524)X_2 + e$$

Keterangan:

Y' = Tingkat kepatuhan orang pribadi

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pengetahuan tentang pajak

X_2 = Persepsi pada petugas pajak

e = Error

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -3,493 Artinya jika variabel pengetahuan pajak (X_1) dan persepsi pada petugas pajak nol, maka tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Y) nilainya adalah -3,493
- b. Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,597 Artinya: jika variabel lain tetap dan pengetahuan pajak meningkat maka tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak akan meningkat sebesar 0,597 poin. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- c. Koefisien regresi persepsi pada petugas pajak (X_2) sebesar 0,524 Artinya: jika variabel lain tetap dan persepsi pada petugas pajak meningkat maka tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meningkat sebesar 0,524 poin. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara persepsi pada petugas pajak dengan tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, semakin tinggi persepsi pada petugas pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

4.5.1 Uji Persial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan dengan tingkat signifikan sebesar 0,5% dengan degree of freedom (df) $n-k$ membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} maka H_o di tolak dan H_a diterima.

Pembuktiaan hipotesis secara persial dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini :

Tabel IV.10

Hasil Regresi Secara Persial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3,493	6,593		-,530	,598	-16,593	9,607					
TOTALX1	,597	,210	,266	2,838	,006	,179	1,015	,326	,288	,262	,973	1,027
TOTALX2	,524	,133	,369	3,938	,000	,260	,788	,412	,385	,364	,973	1,027

Sumber: Data olahan

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel IV.10 diatas makadilakukan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada signifikan 5% dengan asumsi sebagai berikut :

1. Jika signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima
2. Jika signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

Berdasarkan asumsi diatas hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

H₁ : Pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Dari tabel IV. diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 2,838. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2,838 > 1,987$), maka H₁ diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara pengetahuan tentang pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi. Untuk variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,006 (kecil dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini juga mendukung hipotesis pertama (H₁) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Hasil ini sama dengan penelitian Devi Triasih (2009) yang menyatakan pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak . Dari kuesionernya menyatakan memiliki mean yang tinggi sebesar 3,81 dari sembilan pernyataan yang berkaitan dengan kriteria wajib pajak patuh yang memiliki mean diatas mean keseluruhan pernyataannya adalah menyatakan bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.

H₂ : persepsi pada petugas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Dari tabel IV.8 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 3,938. Oleh karena nilai t hitung > t tabel ($3,938 > 1,988$), maka H₂ diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk variabel persepsi pada petugas pajak (X₂) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (kecil dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini juga mendukung hipotesis kedua (H₂) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa persepsi pada petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Untuk pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan statistik Uji F (F-Test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian hipotesis yang dilakukan tepat. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan juga melihat signifikansi lebih kecil dari 5%.

Tabel IV.11

Hasil Regresi (Uji F)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.489 ^a	.239	.222	3,529	.239	13,974	2	89	.000	1,787

Sumber: Data olahan

Dari tabel IV.11 diatas, pada model satu untuk semua variabel independen diperoleh angka signifikan (*p value*) sebesar 0,000 yang berarti bahwa pengetahuan pajak, persepsi pada petugas pajak, sama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan tingkat kesalahan 0,0%. Karena angka ini lebih kecil dari $\alpha=5\%$, maka dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan (signifikan).

Untuk melakukan uji F perlu dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ketiga ini bisa diterima. Dari hasil perhitungan diketahui hasilnya sebagai berikut:

F hitungnya adalah sebesar 13,974

F tabel adalah sebesar 3,100

F hitung > F tabel (13,974>3.100), maka H_3 diterima.

Dengan demikian pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang

pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima yang artinya secara bersama-sama ada pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak sama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada pedagang Pasar Bawah Kecamatan Senapelan.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Devi Triasih(2009) yang menyatakan bahwa persepsi petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan terdapat variabel lain yang menyebabkan wajib pajak patuh dalam kewajibannya. Dimana disini mereka tidak berpengaruh dengan perubahan pelayanan perlakuan yang telah dilakukan oleh petugas pajak demi mindset wajib pajak terhadap petugas pajak dari pemikiran negatif menjadi positif. Hasil penelitian ini menyatakan persepsi pada petugas pajak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana disini mereka berpengaruh dengan perubahan pelayanan perlakuan yang telah dilakukan oleh petugas pajak pada wajib pajak sehingga pemikiran terhadap petugas pajak menjadi negatif.

4.5.3 Koefisien Determinasi

Tabel IV.12

Hasil Regresi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.489^a	.239	.222

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel IV.12 diatas, diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,239 atau 23,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak) terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak) sebesar 23,9%. Atau tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada pedagang Pasar Bawah.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda yang telah dijelaskan pada Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,838 dengan nilai t tabel 1,988 atau ($2,838 > 1,988$), maka H_1 diterima, artinya secara parsial ada berpengaruh signifikan antara pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat disimpulkan hipotesis H_1 diterima atau pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi Triasih ((2009) bahwa pengetahuan tentang pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian hipotesis H_2 menunjukkan bahwa persepsi pada petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 3,938 dengan nilai t tabel 1,988 atau ($3,938 > 1,988$), maka H_2 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara persepsi pada petugas pajak dengan tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak, dapat disimpulkan H_2 diterima dan terlihat bahwa persepsi pada petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak pada pedagang pasar bawah.

3. Hasil pengujian secara bersama-sama (uji F) menerima hipotesis H_3 , yaitu terlihat dari F hitung 13,974 dan F table 3,100 atau ($13,974 > 3,100$), maka H_3 diterima, dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama antara pengetahuan dan persepsi pada petugas pajak signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak.
4. Hasil dari Koefisien Determinasi diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0,239 atau 23,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak) terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak) sebesar 23,9%. Atau tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

1.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih terbatas .
2. Responden yang digunakan dalam penelitian hanya fokus pada 1 instansi saja.
3. Karena menggunakan kuesioner kemungkinan ada suatu respon bias dari responden yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain :
 - (1) kemungkinan responden tidak menjawab secara serius atau tidak jujur,
 - (2) kemungkinan responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang ada di kuesioner.

1.3 Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal mengenai pengetahuan tentang pajak seharusnya pemerintah lebih mensosialisasikan informasi mengenai pajak atau kampanye permasyarakatan pajak secara besar-besaran melalui brosur, melalui telepon atau pemberian brosur dari rumah ke rumah. Dan pada petugas pajak agar lebih memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga wajib pajak bersifat positif terhadap petugas pajak supaya tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak lebih meningkat.

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner sehingga pernyataan-pernyataan didalam kuesioner dapat benar-benar dipahami maksudnya oleh responden. Dan lebih memperluas wilayah penelitian.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambahkan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana,D. (2003). *Himpunan lengkap peraturan perpajakan*. Yogyakarta: Ani yogyakarta.
- Al-Qur'an Karim Surat At-taubah Ayat 29
- Amran ,ChaniagoY. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. CV Pustaka Setia Bandung.
- Arfan,Ikhsan, Dkk. (2008). *Akuntansi Keperilakuan*.Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Fidel, s. (2010). *Cara mudah dan praktis memahami masalah-masalah perpajakan* (vol. Cetakan ke 1). Jakarta:murai kencana: PT Raja granfindo persada.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak* . Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- K.judisseno, r. (2005). *Pajak dan strategi bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk bisnis ekonomi*.Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo .(2009). *Perpajakan*. CV Andi Offsed. Yogyakarta.
- Muljono, d. (2008). *Ketentuan umum perpajakan lengkap dengan undang-undang no.28 tahun 2007*. Yogyakarta: CV .Andi offset(penerbit Andi).
- Nasucha,Chaizi (2004).*Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Penerbit Gramedia,Jakarta

Nurmanto, Safari,m. (2003). *Pengantar perrpajakan*. Jakarta: gaint.

Priyatno,Dwi.(2009) . *Mandiri Belajar SPSS*. Jagarkarta: PT.Buku kita Jl.Kelapa hijau,Jakarta.

Santoso, Singgih, 2004, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Cetakan Keempat, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Sihaloho, d. (2003). *Modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta: PT Raja grafindo perrsada.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajak Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu : Yogyakarta.

Sonny Agustinus, 2009, *Panduan Praktis Perpajakan*, CV. Andi : Yogyakarta

Sugiyono (2003) , *Metode Penelitian Administrasi* ,Bandung: CV. Alfabeta

S Notoatmodjo (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sekaran,Uma (2007).*Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Tri Asih,Devi (2009) .Skripsi: Pengaruh pengetahuan tentang pajak ,persepsi tentang petugas pajak dan penerapan administrasi pekerjaan modren terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. STIE Perbanas, Surabaya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

